



KABUPATEN PESISIR SELATAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM NAGARI)
TAHUN 2022 – 2027



NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembagunan yang ada di Nagari kami yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan disahkan melalui Peraturan Nagari untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari.

Terimakasih kasih kami ucapkan kepada perangkat Nagari, Bamus, Lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, dan Pendamping Kecamatan yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyelesaian Dokumen RPJM, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RPJM Nagari yang akan datang.

Koto Nan Tigo IV Koto Hilie , Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum.....	5
1.4 Pengertian.....	7
1.5 Sistimatika.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM NAGARI.....	12
2.1 Sejarah Nagari.....	12
2.1.1 Kondisi Nagari	13
2.1.2 Demografi.....	15
2.2 Keadaan Sosial.....	17
2.3 Keadaan Ekonomi.....	20
2.4 Kondisi Pemerintahan Nagari	23
2.4.1 Pembagian Wilayah Nagari.....	23
2.4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari.....	23
BAB III VISI DAN MISI	29
3.1 Visi	29
3.2 Misi	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1 Tujuan.....	34
4.2 Sasaran.....	35
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN NAGARI.....	37

5.1	Arah Kebijakan Pembangunan	37
5.1.1	Peta Jalan SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nagari.....	43
5.1.2	Sinkronisasi RPJM Nagari dengan RPJM Kabupaten.....	50
5.2	Potensi dan Masalah	51
5.3	Strategi Pencapaian	55
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI		63
6.1	Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari	63
6.1.1	Kondisi Pendapatan Nagari	63
6.1.2	Kebijakan Pendapatan Nagari	66
6.2	Arah Pengelolaan Belanja Nagari	66
6.2.1	Kondisi Belanja Nagari	66
6.2.2	Kebijakan Belanja Nagari	68
6.3	Arah Pengelolaan Pembiayaan Nagari	69
6.3.1	Kondisi Pembiayaan Nagari	69
6.3.2	Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Nagari	70
6.4	Kebijakan Umum Anggaran	71
BAB VII KEBIJAKAN UMUM		73
7.1	Kebijakan Umum Daerah	74
7.2	Kebijakan Umum Nagari	80
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI		83
BAB IX PENUTUP		85

LAMPIRAN

1. Sketsa/ Peta Desa
2. Diagram Kelembagaan
3. Kalender Musim
4. Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Nagari) Tahun 2022 s/d 2027
5. Berita Acara Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2022 s/d 2027
6. Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2022 s/d 2027

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pengkajian keadaan Nagari menggunakan Kalender Musim	14
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.....	15
Tabel 2.3. Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.....	16
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.	16
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin	16
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Agama	17
Tabel 2.7. Data Sekolah SD di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	17
Tabel 2.8. Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat.	17
Tabel 2.9. Sarana dan Prasarana Keagamaan.....	18
Tabel 2.10. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	19
Tabel 2.11. Sarana dan Prasarana Olah Raga.....	19
Tabel 2.12. Jumlah RTM/ Penerima Bansos/PKH Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021...	20
Tabel 2.13. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.	20
Tabel 2.14. Sarana dan Prasarana Ekonomi	22
Tabel 2.15. Silsilah Kepemimpinan Nagari Koto Nan Tigo	24
Tabel 2.16. Pengkajian keadaan Kelembagaan menggunakan Diagram Venn	27
Tabel 4.1. Sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	35
Tabel 5.1. Sinkronisasi Arah Kebijakan dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	38
Tabel 5.2. Tipologi Desa/Nagari Berdasarkan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)...	45
Tabel 5.3. Kondisi Objektif SDGs Nagari Berdasarkan IDM.....	46
Tabel 5.4. Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SDGs Nagari	48
Tabel 5.5. Potensi dan Sumberdaya untuk Pencapaian SDGs Nagari.....	50
Tabel 5.6. Persandingan Visi dan Misi Nagari dengan Kabupaten	51
Tabel 5.7. Pengkajian Masalah dan Potensi.	54
Tabel 5.8. Strategi Pencapaian Pembangunan Nagari.....	56
Tabel 6.1. Pendapatan Nagari Tahun 2017-2021	64

Tabel 6.2. Realisasi Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2017 s/d 2021	67
Tabel 6.3. Proyeksi Belanja Nagari Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022-2027 ...	68
Tabel 6.4. Kondisi Realisasi Pembiayaan Nagari	69
Tabel 7.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJM Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan	80
Tabel 7.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	81
Tabel 8.1. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari 2022-2027	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari.....	25
Gambar 2.2. Struktur Bamus.....	26
Gambar 2.3. Diagram Venn Kelembagaan Nagari Koto Nan Tigo	26
Gambar L.1. Peta Sosial Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.....	86

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Nagari sebagai upaya Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Nagari, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan Landasan pemikiran dimaksud maka Nagari wajib mempunyai Perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk Jangka waktu 6 (enam) Tahun
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk Jangka waktu 1 (Satu) Tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) ini merupakan pedoman bagi pemerintahan Nagari / Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintahan Nagari / Lembaga dan menjadi bahan pertimbangan Nagari dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nagari.

Rencana pembangunan Jangka menengah Nagari (RPJM Nagari) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.
2. **Partisipasi** Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di Nagari secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin
4. **Terbuka** Yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh Masyarakat Nagari.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pemerintah diNagari maupun pada masyarakat
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga hasil yang terbaik

11. **Penggalian informasi yaitu** didalam menemukan masalah dilakukan pengajian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengabn sumber informasi utama dan peserta musyarakat perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022-2027, yang ditetapkan dalam peraturan Nagari adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari memuat penjabaran visi dan misi, rencana penyelenggaraan pemerintah, arah kebijakan perencanaan pembangunan Nagari dengan memoerhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan, arah kebijakan keuangan nagari, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia .

Perencanaan pembangunan yang dibutuhkan Nagari Khususnya Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan yang akan dilaksanakan selain RPJM Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021-2027 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam Tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2022-2027 dan kemudian dijabarkan kedalam rencana kerja pembangunan Nagari (RKP Nagari)

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilai kinerja Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dalam melaksanakan pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan. Pemberdayaan Masyarakat selama masa Jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dalam laporan pertanggung Jawaban Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang diserahkan Kepada Bamus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie maupun masyarakat umum.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJM Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022- 2027 Sebagai Bahan dasar dan pedoman resmi bagi pemerintahan Nagari, Bamus Nagari, LPMN, PKK, Semua elemen masyarakat masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Nagari. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan–pilihan program kegiatan tahunan Nagari yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana Program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan Nagari.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022-2017 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintahan Nagari, Bamus, Lembaga – lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas Program dan kegiatan tahunan yang akan dibiaya dari APB Nagari
2. Menyediakan Tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur / bidang dalam pemerintahan Nagari
3. Menjabarkan gambarkan tentang kondisi Nagari sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam mewujudkan Visi dan Misi Nagari
4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Nagari, Bamus, LPMN dan Lembaga – Lembaga Kemasyarakatan .
5. Memudahkan Jajaran aparatur Pemerintahan Nagari, Bamus dan Lembaga Masyarakat

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Insonesia tahun 2000 nomor 206)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009.
 18. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
 19. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

20. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
21. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
23. Permedagri No.21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026.

1.4 Pengertian

1. Dana Nagari adalah Dana Nagari (DD) adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Alokasi Dana Nagari yang disingkatkan (ADN) adalah Alokasi Dana Nagari (ADD) yang merupakan alokasi dana kepada pemerintahan Nagari dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
6. Pendamping Desa/Nagari adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah nagari melaksanakan tugas-tugasnya.
7. Forum OPD (Forum yang berhubungan dengan fungsi/ subfungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan OPD atau gabungan OPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja OPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait.
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.
9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Wali nagari kepada Bamus mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan nagari termasuk APB-nagari, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Bamus.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
12. Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan stakeholder nagari (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan nagari dan pihak yang akan

terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

13. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari nagari serta menyepakati kegiatan lintas nagari di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja OPD kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.
14. Partisipasi adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
15. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.
16. Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme reguler.
17. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.
18. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
19. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
21. Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-

Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari.

22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
25. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
26. Setrawan adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
27. Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat.
28. Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan dokumen RPJM Nagari adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Nagari

Bab III Visi dan Misi

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi Pembangunan Nagari

Bab VI Kebijakan Keuangan Nagari

Bab VII Kebijakan Umum

Bab VIII Program Pembangunan Nagari

Bab IX Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM NAGARI

2.1 Sejarah Nagari

Awalnya pada tahun 1960 Nagari Koto Nan Tigo merupakan Nagari perwakilan dari nagari IV Koto Hilie yang terdiri dari 3 (tiga) kampung yaitu kampung Kalumpang, Limau Manis, dan Sungai Pampan. Adapun yang menjadi Wali atau kepala pemerintahan waktu itu adalah Katik Durus kemudian pada tahun 1962 sampai dengan 1964 Katik Durus digantikan oleh Kasim. Pada tahun 1982 Pemerintahan Nagari kembali kepada pemerintahan desa dan Nagari Koto Nan Tigo terpisah dari Nagari IV Koto Hilie menjadi sebuah Pemerintahan Desa, dengan kepala desa terpilih bernama BAKRI, masa jabatan dari tahun 1982 – 1999. Kemudian pada tahun 1999 terjadi pemilihan kepala desa dan terpilihlah NOFRIEDI, S.H sebagai kepala Desa dengan masa kepemimpinan sampai tahun 2002. Pada tahun 2002 pemerintahan desa kembali kepada pemerintahan Nagari dan pemerintahan Desa Koto Nan Tigo bergabung kembali kepada pemerintahan nagari IV Koto Hilie. Karena kekosongan pejabat pemerintahan Wali Nagari maka diadakan pemilihan Wali Nagari IV Koto Hilie dengan calon YUHARZI YUNUS, NOFRIEDI, S.H, dan BAKRI. Ketika itu terpilih YUHARZI YUNUS sebagai Wali Nagari IV Koto Hilie menjabat dari tahun 2002 – 2006 karna ada permasalahan maka diberhentikan dengan tidak hormat oleh bupati pessel selanjutnya dibentuk wali nagari PJS dari 2006-2009. Pada tahun 2009 terjadi pemekaran nagari IV Koto Hilie dan Koto Nan Tigo menjadi sebuah nagari dengan nama Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie. Yang menjabat sebagai wali nagari yaitu NOFRIEDI, SH dan pada tahun 2014 wali nagari tersebut mengundurkan diri untuk pemilihan Anggota dewan maka dipilihlah Wali nagari baru untuk periode 2014-2020 yang mana wali terpilih adalah YUSRIZAL.dan habis nya jabatan beliau Maka dilakukan Pemilihan Wali Periode 2021-2027 dengan calon Wali Nagari NOBERLI, S.Pd.I, PESKI MARDANI,YUSRIZAL, NOFRIEDI, S.H, ketika itu terpilih NOFRIEDI, S.H, sebagai Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie untuk Periode 2021 – 2027.

2.1.1 Kondisi Nagari

Secara geografis Nagari Koto Nan Tigo terletak di perbatasan sebelah barat dengan Samudera Indonesia, utara Nagari IV Koto Hilie, timur Nagari IV Koto Mudiek, dan selatan berbatasan Nagari Taluk serta mempunyai jarak 23 KM dari Ibukota Kabupaten. Secara umum keadaan topografi Nagari Koto Nan Tigo adalah merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan luas wilayah 1.500 Ha. Penggunaan tanah di Nagari Koto Nan Tigo sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas – fasilitas lainnya. Iklim di Nagari Koto Nan Tigo sebagaimana Nagari lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Koto Nan Tigo yang sebagian besar lahan pertanian sawahnya merupakan sawah tadah hujan. Sedangkan lahan perbukitan merupakan tempat perkebunan karet, gambir, pala dll. Minimnya akses sarana prasarana menuju lahan pertanian dan perkebunan, menyebabkan belum maksimalnya hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di Nagari Koto Nan Tigo.

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir atau pun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai merupakan salah satu sumber air utama untuk dapat dimanfaatkan untuk irigasi / pengairan pertanian. Mengingat keadaan musim penghujan dalam beberapa tahun terakhir ini semakin sulit diperkirakan secara pasti, maka air sungai menjadi salah satu alternative sumber pengairan pertanian tanama pangan terutama padi sawah yang banyak memerlukan air.

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman.

Kondisi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie relatif masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan-lahan tidur yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif.

		Panen Baralek	Harga Gabah dan palawija turun Pengeluaran rumah tangga naik Efektifitas kerja menurun	
3	Sungai Pampan	Hujan Kemarau Panen Baralek	❖ Banjir ❖ DBD ❖ Turunnya hasil pertanian dan perkebunan ❖ Lingkungan becek ❖ Jalan Becek ❖ Terganggunya Turun kesawah ❖ Sulitnya mendapatkan air bersih ❖ Penyakit ISPA ❖ Sering terjadi kebakaran ❖ Hasil tanaman palawija turun Harga Gabah dan palawija turun Pengeluaran rumah tangga naik Efektifitas kerja menurun	Sawah Perkebunan Sungai Kayu Batu

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Nagari Koto Nan Tigo adalah 5.877 jiwa (1.299 KK) yang terdiri dari 2.912 orang laki-laki dan 3.019 orang perempuan.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

NO.	KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PERSENTASE
1	Sungai Pampan	2.787	47.42 %
2	Limau Manis	1.851	31,49 %
3	Kalumpang	1.239	21,08 %
	Jumlah	5.877	100,00 %

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Tabel 2.3. Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
1	0 – <1 Thn	145	2,46 %
2	1 – <5 Thn	242	4,11 %
3	5 – 6	504	8,57 %
4	7 – 15	800	13,61 %
5	16 – 21	920	15,65 %
6	22 – 59	2.847	48,44 %
7	60 – keatas	419	7,12 %
Jumlah		5.877	100,00 %

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	PNS	26
2	TNI dan POLRI	12
3	Pensiunan	15
4	Pedagang	17
5	Pertukangan	5
7	Petani / pekebun	752
8	Buruh tani	643
9	Mengurus Rumah Tangga	568
9	Nelayan	257
10	Belum Bekerja	521
11	Tidak Bekerja	678
12	Bidan	8

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	2.858	48,63 %
2	Perempuan	3.019	51,36 %
	Total	5.877	100 %

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE
1	Islam	5.877	100 %
2	Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021

Tingkat pendidikan masih sangat rendah, kebanyakan masyarakat hanya tamatan SLTA dan SLTP hanya sedikit yang tamatan Perguruan Tinggi. Jumlah sarana pendidikan formal maupun non formal juga masih minim, hanya terdapat 3 buah Sekolah Dasar (SD). Untuk pendidikan non formal bidang keagamaan masyarakat mempergunakan sarana ibadah Mushalla dan Mesjid yang dibangun secara swadaya.

Tabel 2.7. Data Sekolah SD di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH MURID	JUMLAH GURU	
			PNS	HONOR
1	SD NO. 28 Jorong nan Tigo	189	7	6
2	SD NO. 32 Limau Manis	95	7	6
3	SD NO. 14 Koto Nan Tigo	85	8	5

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

2.2 Keadaan Sosial

Kondisi sosial mencakup adat istiadat, budaya dan agama serta kesehatan, pendidikan dan seni olah raga. Adat istiadat dan budaya masyarakat Koto Nan Tigo IV Koto Hilie bersifat musyawarah dan mufakat serta kegotong royongan. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.8. Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat.

NO	URAIAN	BENTUK KEGIATAN
1	Pesta Perkawinan	(“ Maanta Anak Pisang ”)
2	Kelahiran Anak/ Akekah dan Qurban	Do’a dan Jamuan Makan
3	Kematian/ Wafat	Pengajian dan Ta’ziah
4	Pembangunan/ memasuki rumah baru	Jamuan Makan (“Tagak kudo-kudo”)

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021

Sarana dan prasarana keagamaan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie mempunyai Masjid dan beberapa Surau/Mushalla ditiap dusun lengkap dengan kepengurusannya. Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel 2.9. Sarana dan Prasarana Keagamaan.

NO	SARANA PRASARANA		LOKASI	KONDISI
	JENIS	NAMA		
I	Masjid	1. Masjid Nurul Huda 2. Masjid Nurul Islam 3. Masjid Nurul Iman 4. Masjid Khairul Huda 5. Masjid Alsyabudin	Limau Manis Kalumpang Koto Baru Sungai Pampan Sungai Pampan	
II	Surau/Mushalla	1. Mushalla Darussalam 2. Mushalla Nurhayat 3. Mushalla Babul Huda 4. Mushalla Miftahul Huda 5. Mushalla Nurhayat 6. Mushalla Baitussalam 7. Mushalla Nurul Akbar	Kalumpang Sungai Pampan Limau Manis Tanah Kare Kalumpang Sungai Pampan Pasar Gompong	

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie mempunyai Polindes yang dikelola oleh tiga (3) orang bidan desa serta dibantu beberapa orang kader dan pos pelayanan terpadu, seperti;

- a. Posyandu Balita (4)
- b. Posyandu Lansia (2)

Sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie mempunyai sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat atas dan pendidikan non formal lainnya yang terdapat di beberapa wilayah kampung. Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel 2.10. Sarana dan Prasarana Pendidikan.

NO	SARANA PRASARANA		LOKASI	KONDISI
	JENIS	NAMA		
I	FORMAL			
	1. PAUD/TK	DELIMA NURUL FIKRI BINA NAGARI	KALUMPANG LIMAU MANIS SUNGAI PAMPAN	BAIK BAIK BAIK
	2. SD	SD 31 LIMA MANIS SD 14 KOTO NAN TIGO SD 28 JORONG NAN TIGO	LIMAU MANIS TANAH KARE SUNGAI PAMPAN	BAIK BAIK BAIK
II	NON FORMAL			
	1. TPA/TPQ	MUSHALLA DARUSSALAM	AMPANG TIGO	BAIK
		MUSHALLA NUR HAYAT	KALUMPANG	BAIK
		MUSHALLA BABUL HUDA	LIMAU MANIS	BAIK
		MASJID NURUL HUDA	LIMAU MANIS	BAIK
		MIFTAHUL HUDA	TANAH KARE	BAIK
		MUSHALLA BAITUSSALAM	SUNGAI PAMPAN	BAIK
		MUSHALLA NUR HAYAT	SUNGAI PAMPAN	BAIK
		NURUL AKBAR	PASAR GOMPONG	BAIK
		RAUDHATUL JANNAH	SUNGAI PAMPAN	BAIK
	2. MAJELIS TAKLIM	MUSLIM	LIMAU MANIS	AKTIF

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021

Sarana dan prasarana serta kegiatan seni dan olah raga di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie mempunyai lapangan seni dan olah raga yang dikelola oleh Karang Taruna dan Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel 2.11. Sarana dan Prasarana Olah Raga.

NO	URAIAN	KONDISI
1	Volly	BAIK
2	Takraw	TIDAK ADA
3	Badminton	TIDAK ADA
4	Tenis Meja	TIDAK ADA
5	Lapangangan Bola Kaki	BAIK

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Tabel 2.12. Jumlah RTM/ Penerima Bansos/PKH Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021

No	Penerima	Jumlah
1	Bansos	345
2	PKH (Program Keluarga Harapan)	165

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Tabel 2.13. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

NO.	KAMPUNG	SARANA / PRASARANA				
		PUSKESMAS PEMBANTU	POSKESRI	POSYANDU	PRAKTEK DOKTER	PRAKTEK BIDAN
1	Koto Baru		✓		-	✓
2	Sungai Pampan		✓		-	✓
3	Limau Manis		✓		-	✓

2.3 Keadaan Ekonomi

Nagari Koto Nan Tigo termasuk salah satu Nagari miskin dibanding Nagari lain yang ada di Kecamatan Batang Kapas dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai petani penggarap, nelayan, peternak dan buruh. Tingkat kesejahteraan masyarakatnya 60 % merupakan masyarakat Ekonomi Kurang Mampu, 30 % merupakan masyarakat Ekonomi Sedang dan 10 % tergolong kepada Masyarakat Ekonomi Kaya. Sumber daya yang ada belum dapat dikelola dengan baik, karena minimnya sarana prasarana pendukung terutama bidang pertanian, perkebunan, nelayan dan industri rumah tangga. Kelompok usaha, Industri kecil dan menengah tidak dapat berkembang dengan baik, disebabkan minimnya modal dan masyarakat belum mempunyai ketrampilan yang cukup untuk mengelola usahanya.

a. Sektor Pertanian, Perkebunan, Fasilitas Umum, Tanah Basah/Kolam dan Tanah Permukiman

Secara geografis Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terutama dalam bidang pertanian dan Kelautan (nelayan). Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam Nagari sebagian besar mata pencaharian penduduk merupakan petani, Nelayan, dan pedagang serta jasa.

Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dengan luas 29 Km², yang diperuntukan untuk Areal persawahan ± 375 Ha, perkebunan ± 820 Ha, Permukiman 415 Ha, Tanah Basah. Hasil Pertanian dan Perkebunan masyarakat yang menonjol diantaranya padi sawah, cengkeh, pinang, gambir, sawit, coklat, serta penumpang dari perkebunan yakni semangkah. Dilihat dari hasil pertanian dan perkebunan pada tahun 2021, adanya peningkatan masing-masing komoditi tersebut diatas, dan menjadi produk andalan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat.

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota		Total	Jumlah Anggota Sudah diisi NIK	Jumlah anggota memiliki lahan kurang dari 1 ha	Jumlah anggota memiliki lahan kurang dari 1-2 ha	Jumlah anggota memiliki lahan lebih dari 2 ha
		(Laki-Laki)	(Perempuan)					
1	SAKATO LIMA MANIS	29	32	61	61	61	0	0
2	TANAH KAREH	47	50	97	97	85	12	0
3	KALUMPANG	50	10	60	60	55	5	0
4	SOLOK BUNGO TANJUANG II	41	26	67	67	66	1	0
5	TALO SALANG	90	25	115	115	92	21	2
6	LINGKUANG BUKIK	27	5	32	32	24	8	0
7	SAIYO LIMA MANIS	64	48	112	112	96	16	0
8	KOTO BARU	14	19	33	33	30	3	0
9	PINCURAN INDAH	67	10	77	77	17	59	1
10	SOLOK BUNGO TANJUNG I	44	12	56	56	51	5	0
	Jumlah	473	237	710	710	577	130	3

b. Peternakan

Sub sektor Peternakan terhadap perekonomian Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, belum begitu besar dari jumlah penduduk yang bermata pencarian di sektor peternakan. Tetapi Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie akan memberikan perhatian yang besar karena sub sektor ini berpotensi untuk dikembangkan secara berkelompok-kelompok.

Keberadaan kelompok-kelompok tani peternakan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie cukup potensial. Kenyataan dengan adanya kelompok-kelompok tani ternak yang masih eksis, yang mana sebelumnya kelompok tersebut belum mendapat bantuan dari pemerintah namun sudah mempunyai modal yang belum bisa diandalkan. Kemudian, dengan adanya bantuan dari Pemerintah untuk mendukung kelompok tani ternak tersebut melalui BKMN, GAPOKTAN, (LKMA) BPR, SPP dsb.

c. Perdagangan

Sebahagian kecil masyarakat Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie berprofesi sebagai pedagang terutama pedagang hasil bumi dan kebutuhan masyarakat sehari-hari serta juga pedagang berada diperantauan, tetapi mereka tidak pernah lupa akan nagarinya sendiri, sehingga peran rantau dalam pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sangat diharapkan sekali.

Tabel 2.14. Sarana dan Prasarana Ekonomi

No	Sarana Prasarana	Lokasi	Keterangan
1	Poskesri	Limau Manis, Sungai Pampan, Koto Baru	Tanah Nagari
2	Posyandu	Limau Manis , Kalumpang, Sungai Pampan, Koto Baru	Tanah Kare
3	Lumbung	Sungai Pampan	Tanah Nagari
4	Embung	Limau Manis, Ampang Tigo	Tanah Nagari
5	Lapangan Bola Kaki	Sungai Pampan	Tanah Kare
6	BumNag	Koto Nan Tigo	
7	Tempat Wisata Teluk Tempurung	Sungai Pampan	

Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

2.4 Kondisi Pemerintahan Nagari

2.4.1 Pembagian Wilayah Nagari

Nagari Koto Nan Tigo merupakan Nagari pemekaran dari Nagari IV Koto Hilie yang terdiri dari tiga Kampung yaitu Kampung Kalumpang, Kampung Sungai Pampan, dan Kampung Limau Manis dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag), tiga orang kaur dan tiga orang Kepala Kampung, Pemerintahan Nagari juga didukung oleh Badan Musyawarah (Bamus) Nagari dan lembaga-lembaga Nagari seperti LPMN, dan KPMN. Karena merupakan Nagari baru, terlihat masih banyak kekurangan terutama bidang fisik sarana prasarana bangunan kantor belum memadai dan mobiler kantor sangat minim. Untuk mendukung pelayanan kemasyarakatan perlu didukung perangkat Nagari yang handal, untuk itu perlu diadakan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat Nagari dan lembaga yang ada demi peningkatan pelayanan kemasyarakatan di Nagari Koto Nan Tigo. Pembuatan dokumen RPJM Nagari Koto Nan Tigo ini merupakan kebutuhan mendesak terutama dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen RPJM tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat. Kampung yang termasuk Wilayah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie adalah:

1. Kampung Sungai Pampan
2. Kampung Limau Manis
3. Kampung Kalumpang

2.4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

Secara historis nama Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie berasal dalam Nagari IV Koto Hilie, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Dengan dilakukannya Pemekaran Pemerintahan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie menjadi 2 (Dua) Pemerintahan Nagari, Pada tahun 2009 terjadi pemekaran nagari IV Koto Hilie dan Koto Nan Tigo menjadi sebuah nagari dengan nama Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie. Yang menjabat sebagai wali nagari yaitu NOFRIEDI, SH dan pada tahun 2014 wali nagari tersebut mengundurkan diri untuk pemilihan Anggota dewan maka dipilihlah Wali nagari baru untuk periode 2014-2020 yang mana wali terpilih adalah YUSRIZAL dan habisnya jabatan Maka dari itu terpilih lah wali definitif adalah NOFRIEDI, S.H untuk Periode 2021 – 2027. Saat akan diadakan pemilihan Wali Nagari maka

berkembanglah isu pemekaran Pemerintahan Nagari, melalui kesepakatan masyarakat di setiap kampung yang ada dalam Nagari IV Koto Hilie menyatakan sepakat untuk melakukan pemekaran Nagari. Penantian panjang masyarakat Nagari IV Koto Hilie berakhir dengan diterbitnya peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 dan 13 Tahun 2009, tentang pembentukan pemerintahan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dan nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.

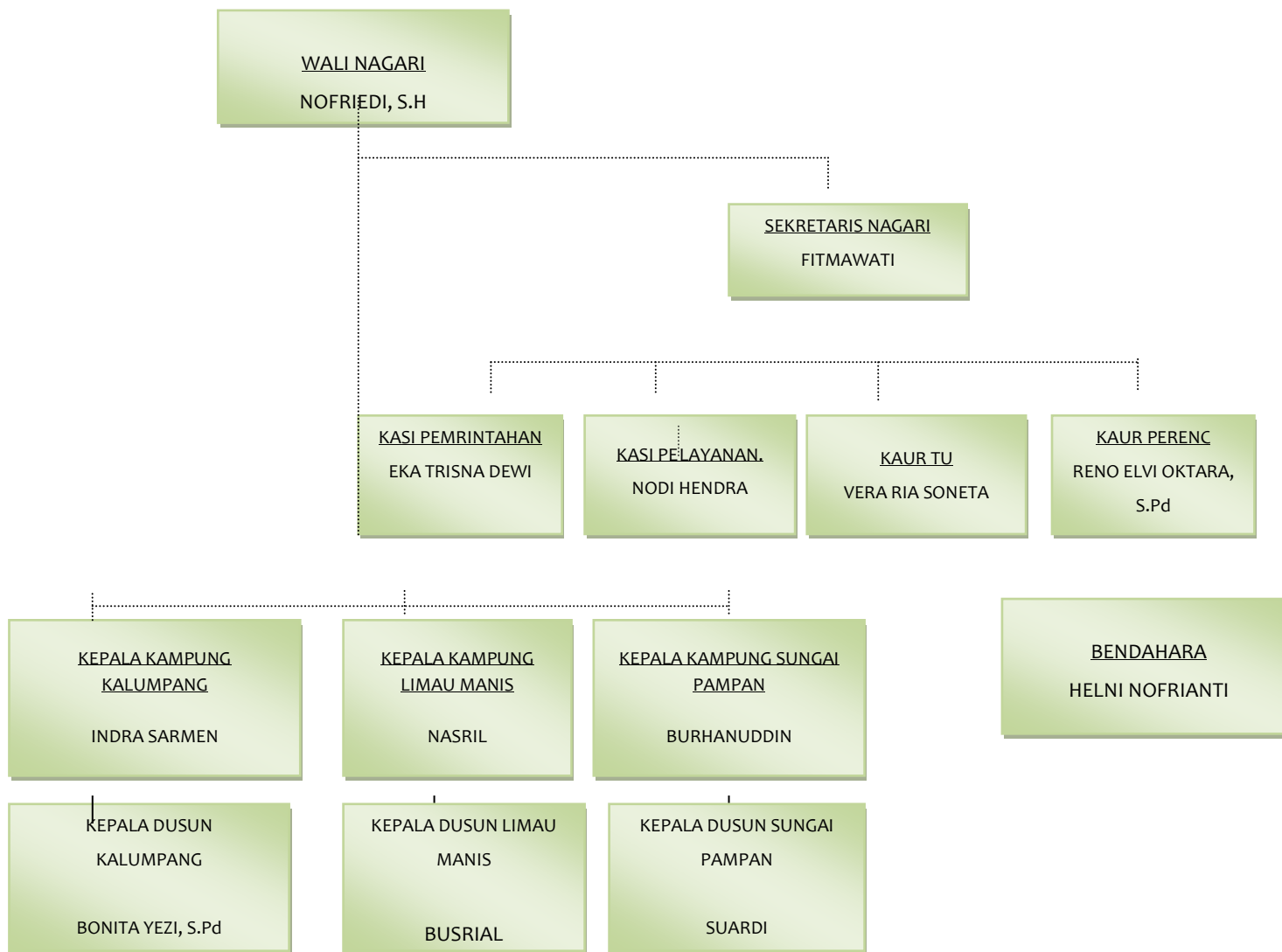
Suku- suku yang ada nagari Koto Na Tigo IV Koto Hilie :

- Caniago
- Melayu
- Sikumbang
- Kampai
- Panai
- Jambak

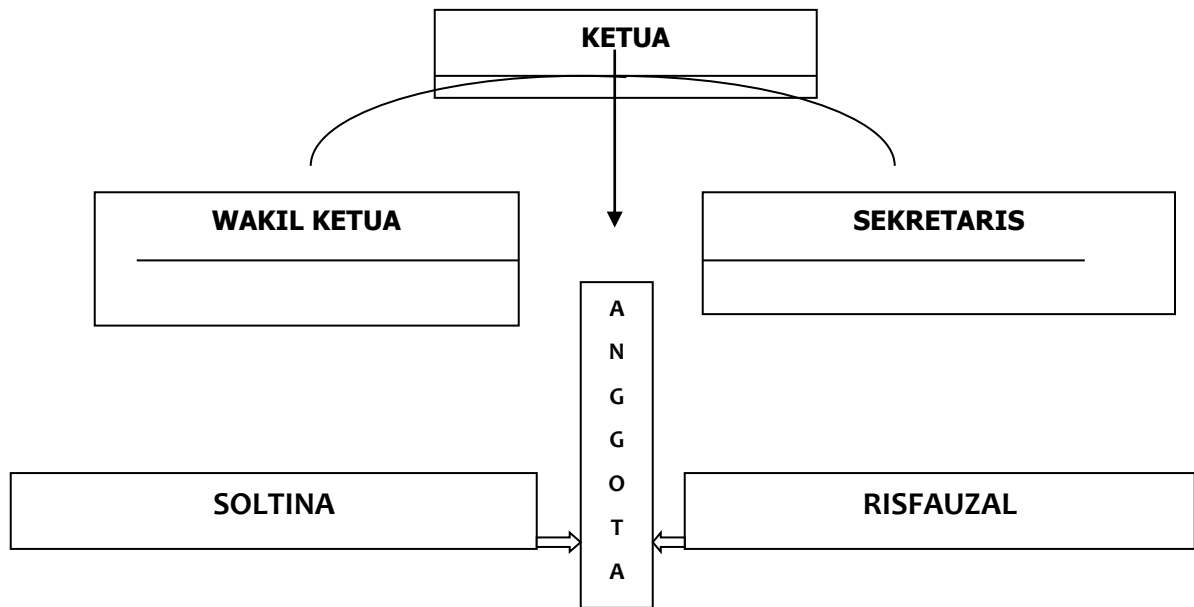
Tabel 2.15. Silsilah Kepemimpinan Nagari Koto Nan Tigo

NO	Periode	Nama Wali Nagari	Keterangan
1.	2009-2014	NOFRIEDI, S.H	Pada Tahun Ke 2014 Beliu Mengundurkan Dengan Hormat karena Pencalonan Anggota Dewan
2.	2014-2020	YUSRIZAL	Wali Terpilih
3.	2021-2027	NOFRIEDI, S.H	Wali Terpilih

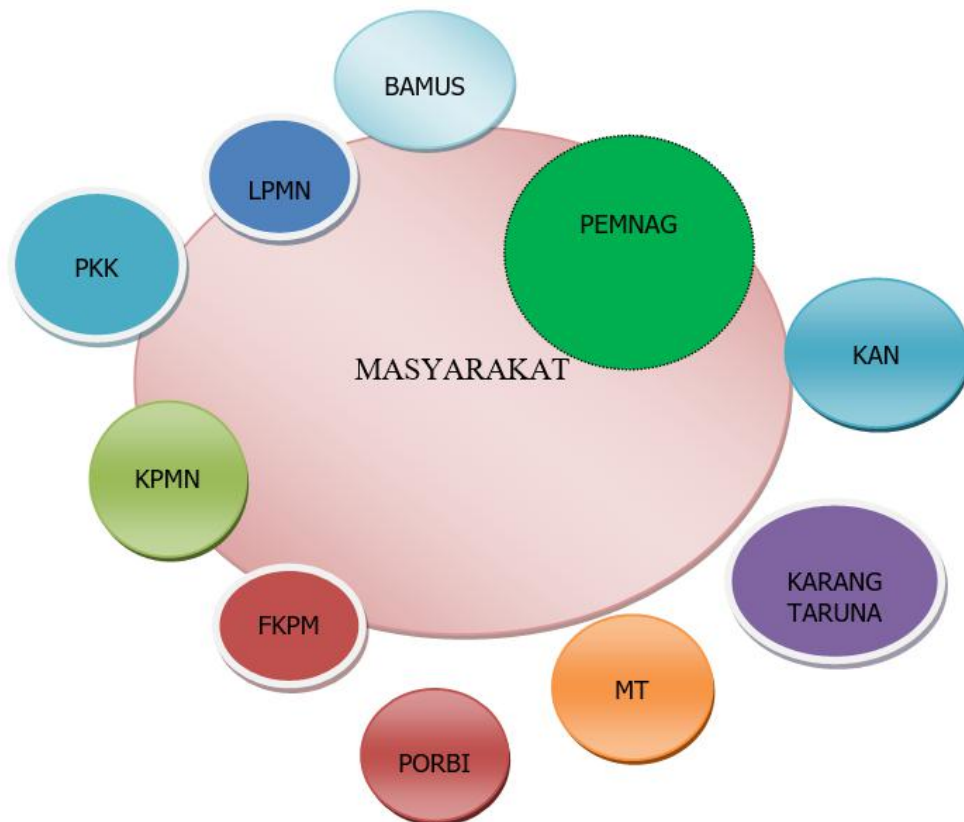
Sumber: Profil Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2009-2021



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari



Gambar 2.2. Struktur Bamus



Gambar 2.3. Diagram Venn Kelembagaan Nagari Koto Nan Tigo

Tabel 2.16. Pengkajian keadaan Kelembagaan menggunakan Diagram Venn

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintahan Nagari	❖ Tunjangan Kesehatan masih kurang ❖ Fasilitas Pelayanan masih kurang ❖ Penegtahuan tentang pemerintahan masih kurang ❖ Sering memakai tempat lain apabila ada pertemuan	❖ Perangkat Nagari lengkap ❖ Lahan kantor tersedia ❖ Batu, kayu, dan tanah timbunan ❖ Tenaga goro dan swadaya
2	Bamus	❖ Belum adanya kantor dan fasilitas ❖ Tunjangan Kesejahteraan belum memadai ❖ Sering memakai tempat lain apabila ada pertemuan LPMN ❖ Pengetahuan tentang Tupoksi masih kurang	❖ Lahan kantor tersedia ❖ Batu, kayu, dan tanah timbunan ❖ Tenaga goro dan swadaya
3	LPMN	❖ Belum ada tunjangan kesejahteraan LPMN ❖ Sering memakai tempat lain apabila ada pertemuan LPMN ❖ Pengetahuan tentang Tupoksi masih kurang	Lembaga LPMN
4	KPMN	❖ Belum ada tunjangan kesejahteraan KPMN ❖ Sering memakai tempat lain apabila ada pertemuan KPMN ❖ Pengetahuan tentang Tupoksi masih kurang	Lembaga KPMN
5	FKPM	❖ Belum ada tunjangan kesejahteraan KPMN ❖ Sering memakai tempat lain apabila ada pertemuan KPMN ❖ Pengetahuan tentang Tupoksi masih kurang ❖ Belum adanya kantor dan fasilitas	Lembaga FKPM
6	Karang Taruna	❖ Belum adanya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keterampilan pemuda ❖ Pengurus kurang aktif ❖ Organisasi tidak bekerja sebagai mana mestinya	Kelompok
7	PKK	❖ Msih kurangnya kesadaran ibu-ibu untuk mengikuti program PKK ❖ Kurangnya sosialisai kepada masyarakat tentang program PKK	Pengurus dan anggota PKK

8	PORBI	❖ Kegiatan dilapangan belum terkoordinasi dengan baik ❖ Kurangnya biaya untuk kegiatan ❖ Perlengkapan masih milik masing-masing anggota	Pengurus Anggota
9	Majelis Taklim	❖ Masih kurangnya kesadaran ibu-ibu mengikuti kegiatan majelis taklim ❖ Belom terorganisasi engan baik ❖ Biaya pelaksaannya masih kurang	Kelompok Majelis Taklim

BAB III VISI DAN MISI

Rumusan Visi dan Misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang Visi kedepan. Sehingga rumusan Visi harus sejalan dengan ciri-ciri khas unik masyarakat ke depan. Rumusan Visi tersebut perlu dirumuskan ke dalam Misi capaian program yang akan dilaksanakan. Hasil penggalan Visi dan Misi tersebut adalah:

3.1 Visi

Visi merupakan pandangan ideal bentuk masa depan yang ingin diwujudkan secara potensial, yang merupakan skenario perwujudan kebijakan atas pandangan tentang apa yang harus ingin dicapai oleh Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo untuk enam tahun kedepan sebagai berikut:

”TERWUJUDNYA NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE YANG MANDIRI, MAJU DAN BERPRESTASI”

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nagari yang Mandiri adalah Nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik potensi Sumber daya Manusia maupun Sumber daya Alam berlandaskan Adat Agama sebagaimana Falsafah minang “Adat Basandi Syarakat Basandi Kitabullah” serta yang ada di Nagari untuk turut serta mewujudkan pembangunan Nagari. Meminimalkan potensi konflik yang terjadi dalam nagari. Mengoptimalkan Seluruh Sumber daya manusia dan sumber daya alam “Dek Barek samo dipikua, dek ringan samo dijinjiang, nan elok baimbauan, nan buaruak baambauan. Elok dek awak, katuju dek urang. Nan bungkuak katangkai bajak, nan luruih katangkai sapu”

“Merangkul Seluruh elemen masyarakat mulai dari kaum tua sampai kaum muda, dari masyarakat perantauan sampai masyarakat yang bertempat tinggal di Nagari serta laki-laki dan Perempuan, dengan menawarkan gagasan-gagasan dan fikiran-fikiran yang jernih dan terbuka dengan didasari niat yang tulus dan cita – cita yang mulia membangun.”

2. Maju mengandung arti dapat melakukan perubahan– perubahan kearah yang lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran Pemerintahan dan lembaga Nagari yang didukung oeh masyarakat baik yang berada di kampung maupun diperantauan untuk kemajuana masyarakat dan nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dalam kerangka mengelola pemerintahan yang baik, bersih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan semangat *Kerja keras dan penuh pengabdian*.
3. Berprestasi mengandung pengertian terwujudnya Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, keluarga, Pemuda, Petani serta seluruh komponen masyarakat Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dalam lingkup kabupaten, provinsi maupun regional dan nasional. Untuk mewujudkan prestasi tersebut maka dapat diarahkan melalui pembangunan mental yang mampu melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan memahami Adat istiadat yang berlaku di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sehingga mampu bersaing dengan masyarakat yang lain.
4. Sejahtera mengandung arti Masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar yang dapat dilihat dengan beberapa ukuran sebagai berikut :
 - a. Tercukupi kebutuhan Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan dan Kesehatan Secara wajar dan layak
 - b. Terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Nagari secara berdaya Dan berhasil guna untuk kemakmuran rakyat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Agama dan Adat istiadat serta Lingkungan.
 - c. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktivitas pertumbuhan ekonomi Nagari diharapkan dapat berkembang secara adil dan merata.
 - d. Terciptanya Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang tertata rapi, bersih dan asri dengan mengedepankan pola pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3.2 Misi

Berdasarkan Visi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie diatas maka DITETAPKAN misi Pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022- 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengamalan norma – norma agama dan adat istiadat.
2. Meningkatkan Derajat dan Kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
3. Meningkatkan pembangunan infratraktur yang merata dan berkelanjutan
4. Meningkatkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan bersih
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan Nagari.

Penjelasan dan penjabaran masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengamalan norma – norma agama dan adat istiadat.
Tujuan akhir dari peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial yang aman, nyaman dan harmonis maka diperlukan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang sesuai dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Peningkatan nilai-nilai tersebut juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi ninik mamak dan perangkatnya sesuai ketentuan adat yang berlandaskan ABS-SBK dan hasil hasil musyawarah bersama. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan seperti: BKMT, Remaja Masjid, LDS dan TPQ/TPSQ dalam mengadakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Meningkatkan Derajat dan Kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.

Peningkatan derajat dan kualitas Kesehatan dapat diupayakan melalui peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk mendukung peningkatan SDM yang berkualitas maka Pemerintah Nagari dapat melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak seperti: Kabupaten, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keterampilan, dan lain-lain. Selain itu, dari sektor infrastruktur juga diperlukan dukungan berupa penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, sarana dan prasarana persampahan.

3. Meningkatkan pembangunan infratraktur yang merata dan berkelanjutan

Untuk mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan wilayah maka diperlukan dukungan sarana prasarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata. Adapun pembangunan infrastruktur tersebut meliputi: peningkatan jalan lingkungan dan pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, Insfrastruktur Kesehatan (Pembangunan Gedung Puskesmas dan Posyandu, sarana dan Prasarana olahraga. Berkaitan dengan aspek pemerataan dan berkelanjutan maka pemerintah Nagari juga harus melakukan pembangunan secara partisipatif artinya melibatkan seluruh stakeholder khususnya Bamus Nagari yang mempunyai peran dan fungsi sebagai lembaga pengawasan. Sehingga pembangunan yang dilakukan Nagari dapat bermanfaat dan berkelanjutan serta mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan sosial masyarakat.

4. Meningkatkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan

Potensi sumber daya alam yang tersedia adalah berupa pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah nagari dapat mendorong masyarakat dalam pengelolaan pertanian khususnya dalam menghasilkan produk turunan dari potensi yang ada sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan perekonomian juga dapat dilakukan melalui pelatihan industri kerajinan tangan atau home industri. Melakukan intensifikasi pemanfaatan lahan yang tersedia, baik sawah, lahan perkebunan dan lingkungan perkarangan (seperti sawah yang bisa ditanam palawija akan diusahakan 2 kali padi dan satu kali palawija), mina padi bagi sawah yang airnya bisa terkendali,

pemanfaatan perkarangan dengan sayuran sayuran dan tanaman muda lainnya, mengolah lahan lahan tidur, sedangkan lahan kebun di bukit-bukit dapat ditanam dengan tanaman keras. Meningkatkan produksi, produktifitas, pengolahan dan pemasaran hasil sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Meningkatkan jumlah pelaku dan kualitas UKM serta dukungan yang berupa pelatihan kewirausahaan untuk pengembangan UKM demi terciptanya lapangan kerja di masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan usaha maka diperlukan dukungan dari Lembaga ekonomi/keuanga sehingga dapat memberikan bimbingan/pendampingan bagi unit-unit usaha yang ada dilingkungan Nagari.

5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan bersih.

Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka perlu dilakukan peningkatan tatakelola pemerintahan Nagari yang baik dan bersih dengan prinsip Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Upaya peningkatan tatakelola tersebut dapat dilakukan dengan penyediaan kantor wali nagari, sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan tatakelola pemerintahan juga perlu didukung oleh sumber daya perangkat nagari yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Sehingga mampu melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengacu kepada indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM).

6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan Nagari.

Untuk mewujudkan program-program pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie maka perlu dilakukan Kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan seperti: Pemerintah Daerah dan Pusat, Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), perantau, perusahaan swasta dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena keterbatasan baik dari sisi sumber daya maupun pendanaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Penetapan visi pembangunan Nagari, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Nagari, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Nagari mencapai kondisi yang yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Nagari, maka misi pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2027 dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengamalan norma – norma agama dan adat istiadat.

- Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tentram dan harmonis
- Terwujudnya pendidikan yang berkualitas

Misi 2: Meningkatkan Derajat dan Kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

- Terwujudnya pembangunan Nagari yang merata dan berkelanjutan

Misi 4: Meningkatkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan

- Terciptanya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan

Misi 5: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan bersih

- Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

Misi 6: Meningkatkan peran serta masyarakat dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan Nagari.

- Terciptanya pembangunan nagari secara partisipatif

4.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau diwujudkan dalam periode 2022– 2027, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan – tujuan yang ada, yaitu :

Tabel 4.1. Sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengamalan norma – norma agama dan adat istiadat	• Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tentram dan harmonis • Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan
2. Meningkatkan Derajat dan Kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat -Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat -Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Nagari yang merata dan berkelanjutan	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan 2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian 3. Meningkatkan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan 4. Meningkatkan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air 5. Terjaminnya kelestarian lingkungan
4. Meningkatkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan	Terciptanya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan	1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin 2. Meningkatkan sektor unggulan 3. Berkembangnya ekonomi kreatif 4. Meningkatkan perekonomian bidang pariwisata

		5. Mengurangi Angka Pengangguran 6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan bersih	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya kinerja Pemerintahan yang baik dan bersih 2. Meningkatnya keterbukaan informasi dan Pelayanan publik
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan Nagari.	Terciptanya pembangunan nagari secara partisipatif	1. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan.

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN NAGARI

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi adalah merupakan sebuah pilihan kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa potensi utama dan prioritas yang dapat dijadikan agenda kebijakan, tetapi mempunyai dampak pengaruh yang sangat besar untuk mendorong pengembangan sektor / potensi yang lainnya secara efisien dan efektif sehingga pada akhirnya seluruh potensi pembangunan akan mempunyai keterkaitan dan multiplier effect secara berantai dan saling menunjang.

Dengan strategi dan kebijakan yang tepat akan dapat tercapai tujuan pembangunan yang lebih cepat sesuai dengan visi dan misi. Adapun cara atau strategi untuk mencapai tujuan dibuatkan melalui Rencana Pembangunan Nagari Koto Nan Tigo tahun 2022– 2027.

Tabel 5.1. Sinkronisasi Arah Kebijakan dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengamalan norma – norma agama dan adat istiadat	• Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tentram dan harmonis • Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis 2. Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1. Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan 2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) ninik mamak dan perangkatnya, melalui pelatihan pelatihan, seminar dan lokakarya tentang adat dan budaya 3. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga-lembaga keagamaan seperti, BKMT, Remaja Masjid, LDS dan TPQ/TPSQ 4. Melakukan program-program pembinaan keluarga sakinah. 5. Melakukan Pembinaan terhadap kelompok – kelompok kesenian tradisional 6. Membuat dan renovasi Pos Kampling Yang ada di Nagari Koto Nan Tigo 7. Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberikan akses Pendidikan 8. Meningkatkan pelatihan softskill dan hardskill bagi masyarakat 9. Mendorong masyarakat untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba

2. Meningkatkan Derajat dan Kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	1. Pembangunan Gedung PUSKESRI 2. Melengkapi sarana prasarana PUSKESRI dan Posyandu 3. Meningkatkan perilaku pola hidup bersih dan sehat 4. Melengkapi dan membenahi sarana dan Prasarana olahraga 5. Mendorong pemanfaatan tanah pekarangan yang kosong untuk penanaman tanaman obat 6. Memberikan akses jaminan Kesehatan dan social masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Nagari yang merata dan berkelanjutan	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan 2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian 3. Meningkatnya akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan 4. Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air 5. Terjaminnya kelestarian lingkungan	1. Menyediakan sarana prasarana pengembangan perekonomian masyarakat terutama pada wilayah-wilayah strategis. 2. Menyediakan sarana prasarana lingkungan pemukiman untuk menunjang kualitas hidup, 3. Melakukan Kerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan akses layanan air minum dan sanitasi layak

4. Meningkatkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan	Terciptanya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin 2. Meningkatnya sektor unggulan 3. Berkembangnya ekonomi kreatif 4. Meningkatnya perekonomian bidang pariwisata 5. Mengurangi Angka Pengangguran 6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan produksi, produktifitas, pengolahan dan pemasaran hasil sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. 2. Meningkatkan jumlah pelaku dan kualitas UKM dan pengembangan usaha sektor pariwisata berbasis masyarakat 3. Menjadikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) sebagai lembaga keuangan di tingkat nagari yang bisa mengendalikan harga produksi pertanian masyarakat. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk pengembangan UKM demi terciptanya lapangan kerja di masyarakat. 5. meningkatkan pelatihan kewirausahaan 6. peningkatan kualitas produk dan jasa melalui standarisasi nasional 7. Program pembinaan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang berbasis agroindustri melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.
---	---	--	--

			8. Bertambahnya penyediaan perluasan pekerjaan dari UKM 9. Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna dan pengembangan pasar
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya kinerja Pemerintahan yang baik dan bersih 2. Meningkatnya keterbukaan informasi dan Pelayanan publik	1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat nagari, Bamus Nagari, LPM Nagari dan lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya melalui Pendidikan dan Pelatihan. 3. Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Nagari dan para pemangku kepentingan ditingkat nagari 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari. 5. Melaksanakan program dan kegiatan secara Transparan, Akuntabel dan Partisipatif 6. Mewujudkan Pemerintahan yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Sehingga mampu melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengacu kepada indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)

			7. Meningkatkan peran dan fungsi Bamus Nagari sebagai lembaga pengawasan 8. Menyediakan layanan sarana pengaduan terhadap pelayanan nagari. 9. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti dengan LSM melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 10. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari 11. Meningkatkan pengelolaan aset nagari untuk anggaran pembangunan nagari 12. Membuat dan menyempurnakan peraturan-peraturan nagari untuk kelancaran pembangunan nagari
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan Nagari.	Terciptanya pembangunan nagari secara partisipatif	1. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan bertanggungjawabkan program dan kegiatan.	1. Melibatkan peran perempuan dalam pembangunan Nagari 2. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga yang ada di Nagari dalam pembangunan 3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mendukung kelancaran pembangunan Nagari

5.1.1 Peta Jalan SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nagari

Sustainable Development Goals (SDGs, atau diindonesiakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari MDGs (Millennium Development Goals) yang sudah dinyatakan berakhir. Berikut 18 tujuan SDGs:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (Desa tanpa Kemiskinan);
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan (Desa tanpa Kelaparan);
3. Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia (Desa Sehat dan Sejahtera);
4. Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup (Pendidikan Desa berkualitas dan tanpa memandang usia);
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan (Keterlibatan perempuan Desa dan kesetaraan gender);
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (Desa layak Sanitasi dan Air Bersih);
7. Memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (Desa berenergi bersih, terjangkau, dan terbarukan);
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata);
9. Membangun Infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan);
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara (Desa tanpa kesenjangan, baik antar warga desa maupun kesenjangan antar desa);

11. Menjadikan Kota dan Permukiman yang aman, tangguh, inklusif, dan Berkelanjutan (Kawasan permukiman desa yang aman dan nyaman);
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dan bertanggung Jawab (Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan);
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (Desa Tanggap Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan samudera, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan (Desa peduli Lingkungan Laut);
15. Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan Ekosistem Darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggundulan gunung, dan menghentikan serta menghentikan degradasi lahan dan menghentikan hilang/musnahnya keanekaragaman hayati (Desa peduli lingkungan darat);
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan untuk semua, dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Desa Damai dan Berkeadilan);
17. Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi Kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Kemitraan untuk pembangunan desa)
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif (mudah menyesuaikan diri dengan keadaan).

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs menggabungkan seluruh konsep pembangunan yang pernah disusun manusia, sebagai konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama ini: pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, resiliensi terhadap bencana, kependudukan, dan sebagainya.

Pemutakhiran Data berbasis SDGs ini adalah pemutakhiran data IDM (Indeks Desa Membangun) yang Sangat Detail, sehingga bisa memberikan informasi lebih Rinci dan lebih banyak terutama berkaitan dengan Desa, RT, Keluarga, dan Individu. IDM ini ditentukan berdasarkan 3 Indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Tabel 5.2. Tipologi Desa/Nagari Berdasarkan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)

Kategori	Tipologi	Skor IDM
Desa Mandiri atau Desa Sembada	Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.	Lebih besar (>) dari 0,8155.
Desa Maju atau Desa Pra-Sembada	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.	Kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
Desa Berkembang atau Desa Madya	Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.	Kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.	Kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama	Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.	Kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907

Melalui Pemutakhiran Data SDGs Desa, selain sebagai Acuan untuk perumusan Rencana Kerja dan acuan utama pengalokasian Dana Desa ditahun 2022, data yang diperoleh nantinya juga menjadi salah satu Dasar Utama perumusan kebijakan baik di tingkat Pusat dan Daerah untuk mensukseskan Tujuan dari Pembangunan Nasional berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals).

Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie melakukan kajian SDGs pada tahun 2021 melalui pembiayaan dari Nagari yang dilakukan oleh Tim Pokja SDGs. Berdasarkan uraian diatas berikut ini disajikan hasil analisis pengkajian kondisi SDGs Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

a. Kondisi Objektif SDGs Nagari

Berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) maka Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie termasuk dalam kategori Nagari yang berkembang yakni mulai dari tahun 2017-2021. Adapun kategori berkembang mempunyai tipologi yaitu Nagari mempunyai potensial untuk menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum bisa mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Adapun berdasarkan dimensinya maka dimensi yang mempunyai nilai rendah adalah dimensi ekonomi sebesar 0,5333 dan dimensi sosial sebesar 0,8114, sedangkan dimensi lingkungan mempunyai nilai yang tinggi yaitu 0,6667. Berikut Tabel 5.3 disajikan kondisi SDGs Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie berdasarkan indikator IDM Tahun 2017-2021.

Tabel 5.3. Kondisi Objektif SDGs Nagari Berdasarkan IDM

Indikator	2018	2019	2020	2021
IDM	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Skor IDM	0,6956	0,6381	0,6705	0,6705

b. Sasaran capaian SDGs Nagari

Berdasarkan hasil analisis indikator IDM maka sasaran yang perlu dilakukan dalam pencapaian SDGs Nagari adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan pelayanan Kesehatan yaitu Dokter
2. Penyediaan ruang publik/RTH
3. Keragaman produksi potensi unggulan Nagari
4. Penyediaan pusat pelayanan perdagangan dan jasa
5. Penyediaan Lembaga keuangan
6. Penyediaan jasa logistik dan distribusi
7. Kemampuan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

c. Masalah dan Solusi dalam upaya Pencapaian SDGs Nagari

Peningkatan dan penurunan status Nagari dipengaruhi pemerintah dan masyarakat, sebagai subjek dan objek pembangunan. Pemerintahan Nagari, dibantu oleh masyarakat setempat untuk melakukan upaya-upaya percepatan Pembangunan Nagari. Jika pengelolaannya baik, maka pembangunan akan berjalan lancar, dan status Nagari akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika Status Nagari bisa mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan status bisa disebabkan oleh berbagai faktor kerentanan, seperti goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial. Sedangkan status Nagari bisa mengalami peningkatan apabila Nagari memiliki kemampuan mengelola daya, terutama potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendorong kemajuan Nagari. Jika pengelolaannya tidak baik, maka pembangunan tidak berjalan lancar, dan status Nagari akan menurun. Oleh karena itu, untuk dapat menjangkau semua dimensi kehidupan, diperlukan tata kelola pemerintahan Nagari yang baik. Pemerintah mempunyai tugas mengelola Nagari untuk kemajuan Nagari tersebut, dan memunculkan ide-ide serta inovasi baru untuk mengelolanya. Pengelolaan pembangunan yang baik adalah ketika pembangunan tersebut dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. untuk dapat menata dan mengelola Nagari demi kemajuan Nagari, diperlukan tata kelola pemerintah Nagari akan mengantarkan Nagari menuju percepatan pembangunan, dan akan

mewujudkan Nagari menjadi Nagari mandiri. Adapun penyebab rendahnya dimensi ekonomi dan lingkungan pada Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie disebabkan karena:

1. keragaman produksi masyarakat
2. ketersediaan pusat pelayanan perdagangan
3. akses distribusi dan logistik
4. akses terhadap Lembaga keuangan dan perkreditan
5. ketersediaan Lembaga ekonomi
6. aksesibilitas wilayah
7. Kurangnya Kemampuan Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Secara umum, penyebab rendahnya dimensi tersebut diatas dipengaruhi oleh lokasi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang berada di daerah perbukitan dan Sebagian di Pesisir Pantai. Sedangkan nagari terdekat yang berada didaerah perlintasan nasional adalah Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dan menjadi pusat kegiatan kecamatan dan terdapat Pasar Kuok, sehingga fasilitas-fasilitas yang mendorong kegiatan perekonomian masyarakat banyak terdapat didaerah ini dibandingkan dengan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie. Hal ini diakrenakan Nagari Koto nan Tigo merupakan Nagari pemekaran dari Nagari IV Koto Hilie. Meskipun demikian, pada komponen keragaman produksi masyarakat masih dapat ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada di nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sehingga dimensi ekonomi dapat ditingkatkan dengan baik.

Tabel 5.4. Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SDGs Nagari

No	Permasalahan	Solusi
1	Keragaman produksi masyarakat	1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan produk turunan dari 2. Menggunakan teknologi dalam meningkatkan produk turunan 3. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga keuangan dan Lembaga usaha lainnya untuk akses pemodalan dan pendampingan wirausaha
2	Ketersediaan pusat	1. Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan dalam

No	Permasalahan	Solusi
	pelayanan perdagangan	lingkup Nagari
3	Akses distribusi dan logistik	1. Melakukan Kerjasama dalam penyediaan Jasa distribusi yang dikelola oleh masyarakat atau Nagari
4	Akses terhadap Lembaga keuangan dan perkreditan	1. Menyediakan akses pemodaln untuk peningkatan UMKM 2. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga keuangan dan perkreditan
5	Ketersediaan Lembaga ekonomi	1. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga keuangan untuk akses pemodaln 2. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap Lembaga keuangan oleh Nagari
6	Aksesibilitas wilayah	1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung jasa perdagangan seperti pembukaan akses jalan-jalan pertanian dan perdagangan dan sarana transportasi angkutan umum
7	Kemampuan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana 2. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbasis kebencanaan dan berkelanjutan 3. Menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

d. Potensi dan Sumberdaya untuk pencapaian SDGs Nagari

Untuk mencapai SDGs Nagari maka diperlukan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah Nagari. Sumber daya tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Nagari sehingga dapat dikembangkan dengan baik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berikut ini diuraikan potensi dan sumber daya yang terdapat di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Tabel 5.5. Potensi dan Sumberdaya untuk Pencapaian SDGs Nagari

NO	BIDANG	POTENSI
1	2	4
1	Pemerintahan Nagari	- Luas tanah kantor Nagari sekitar 400 M2. - Kepala Nagari pendidikan Sarjana - Mempunyai jaringan yang luas dan baik dengan berbagai stakeholder
2	Kesehatan	- Polindes 3 (tiga) unit. - Bidan Nagari 3 (tiga) orang. - Posyandu 4 (Empat) unit. - Kader Kesehatan 35 (tiga puluh lima) orang
3	Pendidikan	- TK 3 (Tiga) Unit. - SD 3 (Tiga) Unit.
4	Perekonomian a. Pertanian	- Masyarakat Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sebagian besar Petani - Kelompok Tani 10 unit. - Gapoktan 2 kelompok
5	Sosial Budaya, Adat dan Agama	- Mesjid 5 (Lima) unit. - Surau/Mushalla 7 (Tujuh) unit. - Majelis Taklim 3 (Tiga) kelompok. - Ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan pemuka masyarakat ("urang nan ampek jinih berperan aktif dalam tugas dan fungsinya).
6	Pariwisata	1. Pantai Taluk Tempurung di Kampung Sungai Pampan 2. Kuliner Olahan Lele Organik 3. Kue Koci

5.1.2 Sinkronisasi RPJM Nagari dengan RPJM Kabupaten

Sinkronisasi pembangunan RPJM Nagari dengan RPJM Kabupaten Pesisir Selatan merupakan suatu keharusan, karena RPJM Nagari merupakan integral dari pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kabupaten. Oleh karena itu, sudah seyogyanya bahwa pembangunan yang ada di Nagari harus selaras dengan arahan pembangunan Kabupaten. Berikut ini disajikan Tabel persandingan sinkronisasi Visi dan Misi antara RPJM Nagari dengan RPJM Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 5.6. Persandingan Visi dan Misi Nagari dengan Kabupaten

Visi Kabupaten: Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional	Visi Nagari: Terwujudnya Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Sebagai Nagari Mandiri, Maju Dan Berprestasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Misi	Misi
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	1. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengamalan norma – norma agama dan adat istiadat.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat	2. Meningkatkan Derajat dan Kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	3. Meningkatkan pembangunan infratraktur yang merata dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan	4. Meningkatkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman tenteram dan dinamis	6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan Nagari

5.2 Potensi dan Masalah

Potensi Nagari yang dimaksud dalam hal ini adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki Nagari baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian pembangunan Nagari. Beberapa potensi Nagari yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Alam.

Sumber daya alam yang dimiliki Nagari Koto nan Tigo IV Koto Hilie berupa lahan pertanian yang cukup luas, sumber daya air yang cukup baik yang berasal dari aliran irigasi Air sungai Batang-Bayang sebagai kawasan pertanian, peternakan, serta perikanan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia yang dimiliki Koto nan Tigo IV Koto Hilie berupa jumlah penduduk yang cukup banyak dengan usia produktif yang terdidik dan terampil dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, beternak, berdagang dan berwiraswasta lainnya.

c. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Nagari Koto nan Tigo IV Koto Hilie meliputi, perdagangan, Pendidikan dan kesehatan, sarana prasarana di Nagari Koto nan Tigo IV Koto Hilie terdapat perbengkelan serta Ruko/Toko-Toko dengan berbagai macam usaha. Di bidang pendidikan mempunyai sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat atas dan pendidikan non formal lainnya. Sedangkan di bidang kesehatan mempunyai beberapa Puskesmas dan Puskesmas yang terdapat di tiap Kampung. Di bidang keamanan dan ketertiban di setiap kampung dilengkapi dengan Pos Kamling. Jalan dalam Nagari Koto nan Tigo IV Koto Hilie meliputi jalan utama Nagari, jalan dusun dan jalan menuju prasarana umum.

Masalah pembangunan Nagari pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum termamfaat belum berdayaguna secara optimal, kelemahan yang belum/tidak teratasi, peluang yang belum/tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang belum/tidak terantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan Nagari adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan Nagari di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Lembaga Nagari, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang memiliki pengaruh kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan Nagari guna menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan Nagari dan karakteristik alokasi belanja desa, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan Nagari (RPJMNag) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintahan Nagari. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Maksud dari analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan Nagari, diluar permasalahan program pembangunan Nagari

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan Nagari dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan Nagari.

c. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari diperlukan pemahaman penataan sebuah perencanaan sebab dengan perencanaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik pula. Sebagai sebuah kegiatan, pemilihan sekumpulan

kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana melakukan dan oleh siapa melakukannya.

Sebagaimana sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Pertimbangannya tentu tidak terlepas dari kondisi waktu yang akan datang, dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan pada saat rencana dibuat. Semua persoalan dalam proses dapat dipetakan sehingga memungkinkan untuk meminimalisir semua kemungkinan yang menjadi titik permasalahannya. Maka sangatlah mengharuskan untuk mengokohkan prinsip perencanaan tersebut baik itu dalam hal pembangunan maupun kegiatan sosial lainnya.

Tabel 5.7. Pengkajian Masalah dan Potensi.

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	Pemerintahan Nagari	- Sarana prasarana kantor Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie - Gedung kantor Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	- Luas tanah kantor Nagari sekitar 400 M2. - Kepala Nagari pendidikan S.I. - Mempunyai jaringan yang luas dan baik dengan berbagai stakeholder
2	Kesehatan	- Sarana posyandu yang kurang lengkap dan sebagian besar sudah - Gedung Polindes ada dan alat kurang lengkap.	- Polindes 3 (tiga) unit. - Bidan Nagari 3 (tiga) orang. - Posyandu 4(Empat) unit. - Kader Kesehatan 35 (tiga puluh lima) orang
3	Pendidikan	- Ada gedung TK Nagari masih kurangnya sarana dan prasananya - Drainase SD 28 Jorong Nan Tigo	- TK 3 (Tiga) unit. - SD 3 (Tiga) unit.
4	Perekonomian a. Pertanian	- Jalan menuju Pertanian yang belum bisa dilalui Kendaraan dan keadaan jalan tersebut belum rabat beton - Irigasi yang kurang lancar	- Masyarakat Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sebagian besar Petani - Kelompok Tani 10 unit. - Gapoktan 2 kelompok

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
	b. Perikanan c. Perkebunan d. Perdagangan e. UMKM f. dll	- Minimnya pengetahuan tentang teknologi pertanian - Penggunaan Pupuk Pestisida - Belum optimalnya pengolahan produk unggulan - Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan pengolahan produk unggulan - Belum tersedianya akses pasar terhadap produk unggulan - Belum tersedianya akses pemodalan dalam pengembangan UMKM - Belum tersedianya akses distribusi dan ketersediaan bahan baku produk unggulan	
5	Sosial Budaya, Adat dan Agama	- meramaikan Mesjid dan Surau/Mushalla. - Masyarakat kurangnya pemahaman dan pengamalan atas ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan dalam upaya ketentraman masyarakat Nagari	- Mesjid 5 (Lima) unit. - Surau/Mushalla 7 (Tujuh) unit. - Majelis Taklim 3 (Tiga) kelompok. - Ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan pemuka masyarakat (“urang nan ampek jinih” berperan aktif dalam tugas dan fungsinya).

5.3 Strategi Pencapaian

Strategi pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Nagari.

Tabel 5.8. Strategi Pencapaian Pembangunan Nagari

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
7. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengamalan norma – norma agama dan adat istiadat	• Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tentram dan harmonis • Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	3. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis 4. Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	10. Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan 11. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) ninik mamak dan perangkatnya, melalui pelatihan pelatihan, seminar dan lokakarya tentang adat dan budaya 12. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga-lembaga keagamaan seperti, BKMT, Remaja Masjid, LDS dan TPQ/TPSQ 13. Melakukan program-program pembinaan keluarga sakinah. 14. Melakukan Pembinaan terhadap kelompok – kelompok kesenian tradisional 15. Membuat dan renovasi Pos Kampling Yang ada di Nagari Koto Nan Tigo 16. Melakukan Kerjasama	1. Mengundang narasumber yang berskala nasional dalam kegiatan Nagari 2. Mengadakan lomba keluarga Sakinah 3. Memberikan bantuan biaya untuk kegiatan sosial dan keagamaan 4. Memberikan modal usaha bagi UMKM Start up 5. Memberikan insentif kepada masyarakat yang berprestasi 6. Mengadakan kegiatan olahraga dan kepemudaan tingkat nagari

			dengan berbagai pihak dalam memberikan akses Pendidikan 17. Meningkatkan pelatihan softskill dan hardskill bagi masyarakat 18. Mendorong masyarakat untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba	
8. Meningkatkan Derajat dan Kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 5. Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat 6. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	7. Pembangunan Gedung PUSKESRI 8. Melengkapi sarana prasarana PUSKESRI dan Posyandu 9. Meningkatkan perilaku pola hidup bersih dan sehat 10. Melengkapi dan membenahi sarana dan Prasarana olahraga 11. Mendorong pemanfaatan tanah pekarangan yang kosong untuk penanaman tanaman obat 12. Memberikan akses jaminan Kesehatan dan social masyarakat	1. Memberikan bibit untuk tanaman obat keluarga 2. Memberikan penyuluhan tentang manfaat tanaman obat keluarga 3. Memberikan pelayanan Kesehatan secara door to door 4. Memberikan dukungan sarana dan prasarana olahraga

9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Nagari yang merata dan berkelanjutan	6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan 7. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian 8. Meningkatnya akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan 9. Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air 10. Terjaminnya kelestarian lingkungan	4. Menyediakan sarana prasarana pengembangan perekonomian masyarakat terutama pada wilayah-wilayah strategis. 5. Menyediakan sarana prasarana lingkungan pemukiman untuk menunjang kualitas hidup, 6. Melakukan Kerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan akses layanan air minum dan sanitasi layak	1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan peningkatan saluran irigasi 2. peningkatan jalan lingkungan dan pembuatan saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. 3. Melakukan penghijauan terhadap lahan kosong
10. Meningkatkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan	Terciptanya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan	7. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	10. Meningkatkan produksi, produktifitas, pengolahan dan pemasaran hasil sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.	1. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga miskin dan rentan miskin 2. Memberikan akses

		8. Meningkatnya sektor unggulan 9. Berkembangnya ekonomi kreatif 10. Meningkatnya perekonomian bidang pariwisata 11. Mengurangi Angka Pengangguran 12. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	11. Meningkatkan jumlah pelaku dan kualitas UKM dan pengembangan usaha sektor pariwisata berbasis masyarakat 12. Menjadikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) sebagai lembaga keuangan di tingkat nagari yang bisa mengendalikan harga produksi pertanian masyarakat. 13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk pengembangan UKM demi terciptanya lapangan kerja di masyarakat. 14. meningkatkan pelatihan kewirausahaan 15. peningkatan kualitas produk dan jasa melalui standarisasi nasional 16. Program pembinaan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang	pemodalan usaha UMKM 3. Melakukan pendampingan usaha UMKM baru (Start Up) 4. Memberikan bantuan bibit pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan 5. Memberikan dukungan teknologi tepat guna 6. Meningkatkan keterampilan ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan industri kerajinan tangan atau home industri. 7. Memberikan pelatihan pengolahan turunan produk unggulan 8. Memberikan pelatihan tentang pengemasan produk 9. Membantu pemasaran produk 10. Membangun pusat perdagangan nagari
--	--	--	--	---

			berbasis agroindustri melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. 17. Bertambahnya penyediaan perluasan pekerjaan dari UKM 18. Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna dan pengembangan pasar	
11. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya kinerja Pemerintahan yang baik dan bersih 2. Meningkatnya keterbukaan informasi dan Pelayanan publik	13. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. 14. Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat nagari, Bamus Nagari, LPM Nagari dan lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya melalui Pendidikan dan Pelatihan. 15. Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Nagari dan para pemangku kepentingan ditingkat nagari	1. Memberikan kenyamanan dalam pelayanan 2. Memberikan pelayanan tepat waktu 3. Melibatkan seluruh stakeholder kunci dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat 4. Mendorong pengelolaan BUMNag yang sehat 5. Menyediakan papan informasi kegiatan nagari 6. Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam penguatan kapasitas

			16. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari. 17. Melaksanakan program dan kegiatan secara Transparan, Akuntabel dan Partisipatif 18. Mewujudkan Pemerintahan yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Sehingga mampu melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengacu kepada indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) 19. Meningkatkan peran dan fungsi Bamus Nagari sebagai lembaga pengawasan 20. Menyediakan layanan sarana pengaduan terhadap pelayanan nagari. 21. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti dengan LSM melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	SDM dan penyelenggaraan pemerintahan nagari
--	--	--	--	---

			22. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari 23. Meningkatkan pengelolaan aset nagari untuk anggaran pembangunan nagari 24. Membuat dan menyempurnakan peraturan-peraturan nagari untuk kelancaran pembangunan nagari	
12. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan Nagari.	Terciptanya pembangunan nagari secara partisipatif	1. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan bertanggungjawab kan program dan kegiatan.	1. Melibatkan peran perempuan dalam pembangunan Nagari 2. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga yang ada di Nagari dalam pembangunan 3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mendukung kelancaran pembangunan Nagari	1. melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan perantau, pihak kecamatan, kabupaten dan provinsi maupun pusat 2. Melibatkan Lembaga nagari dalam kegiatan nagari

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

6.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari adalah semua penerimaan uang yang masuk pada rekening Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Pendapatan nagari terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)
3. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN)
4. Bagi Hasil Pajak PBB
5. Bantuan keuangan dari pemerintahan Propinsi, pemerintahan Kabupaten
6. Hibah
7. Sumbangan Pihak Ketiga

6.1.1 Kondisi Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Nagari dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan Pendapatan Nagari, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber Pendapatan Nagari meliputi pendapatan asli Nagari (PAD/Nag), dana perimbangan, lain-lain Pendapatan Nagari yang sah.

Dalam hal APBDes/Nag terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes/Nag), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDes/Nag mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes/Nag), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- b. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- c. Mencari pinjaman Pemerintah Nagari kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Nagari. Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Nagari perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relative rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (2) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta (3) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Nagari.

Kondisi selengkapnya dan perkembangan realisasi pendapatan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie 5 (lima) tahun terakhir, Tahun Anggaran 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Pendapatan Nagari Tahun 2017-2021

No	Sumber Pendapatan	Jumlah Anggaran (Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PAD	3.944.729,36	-	-	-	-
2	Dana Desa	821.330.643,36	943.693.000,-	932.365.000,-	947.546.000,-	937.010.000,-
3	Alokasi Dana Desa APBN	544.062.915,37	510.253.800,-	514.545.500,-	505.231.600,-	465.856.900,-
4	Bagi hasil Pajak dan Retribusi	33.056.556,74	29.673.100,-	30.100.400,-	29.182.500,-	24.103.600,-
5	Bantuan keuangan dari Propinsi	12.000.000,00	-	-	-	-
6	Bantuan keuangan dari Kabupaten	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Desa yang Sah	-	2.100.000,-	-	-	-
8	Bunga Bank	-	-	1.500.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
	Total	1.414.394.844,83	1.485.719.900,-	1.478.510.900,-	1.483.960.100,-	1.428.970.500,-

Berdasarkan tabel 6.1 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie terdiri dari pendapatan Asli Nagari, Dana Desa, Alokasi Dana Desa APBN, Bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi, pendapatan Nagari yang sah dan Bunga Bank. Total pendapat Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie mencapai Rp. 1,414 milyar pada tahun 2017 kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 1,485 Milyar. Namun pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1,428 Milyar. Penurunan ini disebabkan karena dampak pandemic Covid 19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan secara global.

Pendapatan Asli Nagari adalah sebesar Rp. 3.944.729,36 pada tahun 2017. Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 821.330.643,36 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 943.693.000,00. Pada tahun-tahun selanjutnya pendapatan dari Alokasi Dana Desa bersifat fluktuatif yaitu Rp. 932.365.000,00 pada tahun 2019, kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp. 947.546.000,00 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp. 937.010.000,00.

Pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa APN secara umum terus mengalami penurunan. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 544.062.915,37, kemudian menurun menjadi Rp. 505.231.600,00 pada tahun 2020. Dan terakhir pada tahun 2021 pendapatan Alokasi Dana Desa APBN menurun drastis menjadi Rp. 465.856.900,00.

Pendapatan yang berasal dari Bagi hasil Pajak dan Retribusi tertinggi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 33.056.556,74 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 29.673.100,00. Kondisi ini terus mengalami penurunan yang drastis yaitu pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 24.103.600,00.

Pendapatan nagari Koto Nan Tigo juga pernah mendapatkan Bantuan keuangan dari Propinsi pada tahun 2017 sebesar Rp. 12.000.000,00 dan Pendapatan Desa yang Sah sebesar Rp. 2.100.000,00 pada tahun 2018. Pendapatan lainnya adalah berasal dari Bunga Bank yaitu mulai tahun 2019 sebesar Rp. 1,5 juta dan Rp. 2 juta masing-masing pada tahun 2020 dan 2021.

6.1.2 Kebijakan Pendapatan Nagari

Pengelolaan Pendapatan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie diarahkan pada sumber – sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas desa dengan tetap mengupayakan sumber – sumber pendapatan desa meliputi pendapatan Asli desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana perimbangan atau Alokasi Dana desa (ADD), Sumber Pendapatan desa yang berasal yang berasal pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa. Arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Nagari sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem insentif and disinsentif sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
2. Memobilisasi potensi sumber dana masyarakat secara berkelanjutan.
3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, serta pendapatan Bagi Hasil Pajak dan pendapatan yang sah lainnya.

6.2 Arah Pengelolaan Belanja Nagari

6.2.1 Kondisi Belanja Nagari

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Nagari yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja Nagari harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber Pendapatan Nagari oleh Pemerintah Nagari serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Nagari.

Belanja Nagari diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu Belanja Nagari harus

memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Belanja Nagari terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Suatu arah Pengelolaan belanja desa di maksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan Strategis dapat dibiayai oleh APBDesa, Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan. Belanja desa di Klasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Realisasi belanja secara umum terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Pada tahun 2017 realisasi belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie adalah sebesar 1,366 milyar, kemudian meningkat menjadi 1,462 milyar pada tahun 2018 dan 1,527 milyar pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 1,461 milyar dan pada tahun 2021 menjadi 1,400 milyar. Kondisi penurunan ini disebabkan karena pengaruh pandemi Covid 19 yang melanda secara global.

Kondisi selengkapny dan perkembangan realisasi belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie 5 (lima) tahun terakhir, Tahun Anggaran 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2. Realisasi Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2017 s/d 2021

URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6
Belanja Pegawai	286.862.000,00	364.230.000,00	373.596.000,00	409.700.000,00	433.465.536,00
Belanja Barang Dan Jasa	308.721.778,41	261.020.859,39	448.146.369,40	411.266.831,21	685.596.090,21
Belanja Modal	791.187.000,00	837.374.400,01	695.658.457,69	275.632.079,96	152.300.472,04
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	10.000.000,00	365.045.000,00	128.657.500,00
Jumlah	1.366.770.778,41	1.462.625.259,40	1.527.400.827,09	1.461.643.911,17	1.400.019.598,25

Berdasarkan tabel diatas kelihatan bahwa Belanja Nagari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat. Sedangkan proyeksi belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie 6 (enam) tahun kedepan, Tahun Anggaran 2022 s/d 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3. Proyeksi Belanja Nagari Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022-2027

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2027	TAHUN 2027
1	2	4	5	6	7	8	
1.	Belanja Pegawai	333.465.536,00	423.465.566,00	400.465.536,00	412.465.536,00	413.465.536,00	433.465.536,00
2.	Belanja Barang Dan Jasa	655.596.090,21	635.596.190,21	650.596.090,21	685.596.090,21	685.596.090,21	685.596.090,21
3.	Belanja Modal	152.300.472,04	150.300.472,04	152.300.472,04	152.300.472,04	152.300.472,04	150.300.472,04
4.	Belanja Tak Terduga	128.657.500,00	118.657.500,00	120.657.500,00	128.657.500,00	121.657.500,00	120.657.500,00
		1.270.019.598,25	1.328.019.728,25	1.324.019.598,25	1.379.019.598,25	1.373.019.598,25	1.390.019.598,25

6.2.2 Kebijakan Belanja Nagari

Belanja Desa di pergunakan dalam rangka mendanai Penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Berdasarkan Bidangnya maka klasifikasi Belanja Nagari terdiri atas kelompok: Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Belanja bidang Pembangunan Nagari, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Belanja Bidang Belanja Tak Terduga, dan belanja untuk bidang kebencanaan. Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022 – 2027) diarahkan pada:

1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Nagari, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Nagari dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
3. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap Program/ kegiatan pembangunan Nagari sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
4. Peningkatan akses informasi tentang belanja Nagari oleh masyarakat peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi: Proses, keluaran dan hasil.

5. Peningkatan rasional alokasi besarnya plafon anggaran belanja Nagari sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Nagari dan prioritas kebutuhan Nagari serta pertimbangan kinerja.

6.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Nagari

6.3.1 Kondisi Pembiayaan Nagari

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan, Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Tabel 6.4 disajikan realisasi pembiayaan nagari tahun 2017-2021.

Tabel 6.4. Kondisi Realisasi Pembiayaan Nagari

URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6
Penerimaan Pembiayaan	1.414.394.844,83	1.485.719.900,00	1.478.510.900,00	1.483.960.100,00	1.428.970.500,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.366.770.778,41	1.462.625.259,40	1.527.400.827,09	1.461.643.911,17	1.400.019.598,25
Surplus (+) / Defisit (-)	47.624.066,42	23.094.640,60	-48.889.927,09	22.316.188,83	28.950.901,75

Berdasarkan tabel 6.4 diatas dapat dilihat selama ini terdapat surplus pembiayaan nagari yang belum dimanfaatkan secara optimal. Adapun penyebab dari kondisi tersebut adalah karena kurangnya perencanaan dan penganggaran serta profesionalitas SDM dalam mengelola keuangan nagari. Selain itu, penyebab surplusnya keuangan nagari juga disebabkan karena waktu pelaksanaan yang cenderung dilakukan diakhir tahun anggaran. Penyebab lainnya adalah sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil yang diberikan diakhir tahun sehingga tidak dapat dilaksanakan untuk rencana pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan Nagari dan jika ada kendala diluar teknis perlu dilibatkan seluruh pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari.

6.3.2 Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Nagari

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Nagari, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Nagari terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan Pembiayaan Nagari diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes/Nag. Struktur Pembiayaan Nagari yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Formulasi kebijakan pengelolaan Pembiayaan Nagari didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Nagari atas dasar kemampuan APBDes/Nag dan pinjaman Nagari dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Nagari, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- b. Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

6.4 Kebijakan Umum Anggaran

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Bamus Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, yang ditetapkan dengan peraturan Nagari. APBNag harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Nagari, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Nagari dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBNag disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Nagari dan mengacu pada agenda pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Kebijakan Umum Anggaran Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dijadikan pedoman dalam menyusun APBNag dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu actual, dalam penyusunan APBNag juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti: Tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan terutama sekali hasil Musrenbang Nagari.

Berdasarkan uraian diatas maka misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Nagari secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBNag pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Nagari untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Nagari kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi APBNag kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap objektivitas anggaran.

2. Disiplin Anggaran

Anggaran Nagari disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah Nagari harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Nagari. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi desa sesuai mekanisme pasar.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten tentang pengelolaan keuangan Nagari dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan Pemerintah Nagari dalam mengantisipasinya.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pembangunan nagari bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan nagari dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah nagari berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, Yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan sdm, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan nagari.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan nagari demi mendukung strategi pembangunan nagari.

Setelah Kebijakan Umum Dibuat, Langkah Selanjutnya Adalah Merumuskan Program Pembangunan Nagari. Tahap Ini Sangat Penting Dalam Perumusan Rpjmdes/Nag Karena hasil dari perumusan program pembangunan Nagari menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan Nagari adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 6 (enam) tahun. Program pembangunan Nagari merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan Nagari. Program pembangunan Nagari dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program WaliNagari terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

7.1 Kebijakan Umum Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 maka visi yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) misi serta tujuan, sasaran dan startegi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Misi I: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan

Tujuan: Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Strategi 1: Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator berikut, yaitu:

- a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah,
- b. Nilai SAKIP,
- c. Skor LPPD,
- d. Level Maturitas SPIP Pemerintah

Sasaran 2: Meningkatkan kapabilitas birokrasi

Strategi: Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Indeks Kelembagaan
- b. Indeks SPBE
- c. Indeks Profesionalitas ASN
- d. Indeks Inovasi

Sasaran 3: Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik

Strategi 1: Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan

Strategi 2: Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat

Kedua strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.

Strategi 3: Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Kategori Keterbukaan Informasi Publik.

Misi II: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Tujuan 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Strategi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Angka Kematian Ibu
- b. Angka Kematian Bayi

Strategi 2: Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator yaitu:

- a. Prevalensi Stunting
- b. Angka KesakitanRPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

Sasaran 2: Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat

Strategi: Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator persentase masyarakat yang terlindungi hak jaminan kesehatan.

Tujuan 2: Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Sasaran 1: Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat

Strategi: Memberikan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Sasaran 2: Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin

Strategi 1: Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin

Strategi 2: Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan

Strategi 3: Menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miski

Ketiga strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator yaitu: Pengeluaran Perkapita

Strategi 4: Memenuhi ketercukupan pangan dan gizi masyarakat

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Misi III: Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan

Sasaran 1: Meningkatnya investasi PMA dan PMDN

Strategi: Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat.

Sasaran 2: Meningkatnya PDRB sektor unggulan

Strategi: Meningkatkan produk unggulan daerah

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK).
- b. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan.

Sasaran 3: Menurunnya pengangguran

Strategi 1: Meningkatkan kesempatan kerja

Strategi 2: Meningkatkan kualitas tenaga kerja

Kedua strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan

Strategi: Meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Persentase jalan kabupaten kondisi baik.
- b. Proporsi lahan sawah beririgasi baik.
- c. Rasio konektivitas.

Sasaran 5: Terjaminnya kelestarian lingkungan

Strategi: Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Misi IV: Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Tujuan: Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat

Sasaran 1: Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di Pantai Barat Indonesia

Strategi: Meningkatkan daya saing pariwisata

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Jumlah Kunjungan Wisatawan.
- b. Lama Tinggal Wisatawan.

Sasaran 2: Berkembangnya ekonomi kreatif

Strategi: Mengembangkan sektor ekonomi kreatif pendukung pariwisata Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Nilai omset usaha ekonomi kreatif.

Misi V: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Tujuan 1: Terwujudnya pendidikan yang berkualitas

Sasaran 1: Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan

Strategi 1: Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan

Strategi 2: Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Harapan Lama Sekolah.
- b. Rata-Rata Lama Sekolah.

Sasaran 2: Meningkatnya daya saing pendidikan

Strategi 1: Meningkatkan prestasi pendidikan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional.

Strategi 2: Meningkatkan budaya literasi

Strategi 3: Menjalin kerjasama daerah dengan Perguruan Tinggi

Kedua strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Tujuan 2: Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing

Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat

Strategi 1: Memperkuat peran surau sebagai sentral pendidikan masyarakat

Strategi 2: Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama pada anak usia sekolah

Kedua strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Musholla.

Strategi 3: Mengoptimalkan peran zakat dan infak dalam mendorong kesejahteraan masyarakat

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Persentase pemenuhan kewajiban membayar zakat harta.

Sasaran 2: Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing

Strategi 1: Meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional.

Strategi 2: Mengembangkan wirausaha muda

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Jumlah Wirausahawan yang Berdaya Saing.

Misi VI: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman tenteram dan dinamis

Tujuan: Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tenteram dan dinamis

Sasaran 1: Terwujudnya keluarga bahagia.

Strategi 1: Membangun keluarga yang harmonis.

Strategi 2: Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan untuk keharmonisan dan kesejahteraan keluarga

Kedua Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Proporsi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga.
- b. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Sasaran 2: Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri

Strategi 1: Meningkatkan penanganan bencana

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Jumlah Nagari yang Mandiri Dalam Penanganan Bencana.

Strategi 2: Meningkatkan peran serta kaum perempuan, disabilitas dalam pembangunan daerah

Strategi 3: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban

Kedua strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Tabel 7.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJM Daerah di Kabupaten
Pesisir Selatan

Tahun	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
2022	Pemulihan ekonomi dan reformasi structural untuk mewujudkan Pesisir Selatan lebih bermartabat	1. Peningkatan Sumber daya manusia 2. Penanganan dampak Pandemi Covid 19 3. Reformasi Birokrasi 4. Sosial Budaya
2023	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan sumber daya yang unggul, pengembangan potensi wisata dan pangan serta peningkatan pelayanan public	1. Peningkatan sumberdaya manusia 2. Pemulihan ekonomi disektor pariwisata, pangan dan infrastruktur 3. Peningkatan Pelayanan Publik
2024	Peningkatan daya saing daerah dan produktivitas sektor unggulan	1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia 2. Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah 3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan
2025	Pemantapan industry pangan local yang berdaya saing nasional dengan didukung oleh teknologi tepat guna	1. Peningkatan SDM pengolahan, ekonomi masyarakat, pengembangan riset dan teknologi tepat guna 2. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan
2026	Kemandirian daerah didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat	1. Kemandirian Ekonomi 2. Sosial Budaya 3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan

7.2 Kebijakan Umum Nagari

Berdasarkan uraian kebijakan umum daerah dan visi Nagari Koto Nan Tigo yaitu **TERWUJUDNYA NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE YANG MANDIRI, MAJU DAN BERPRESTASI**, maka dilakukan penyelarasan arah kebijakan dan prioritas dalam pentahapan pembangunan yang disajikan dalam tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Tahun	Kabupaten Pesisir Selatan		Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	
	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan		
2022	Pemulihan ekonomi dan reformasi structural untuk mewujudkan Pesisir Selatan lebih bermartabat	1. Peningkatan Sumber daya manusia 2. Penanganan dampak Pandemi Covid 19 3. Reformasi Birokrasi 4. Sosial Budaya	1. Pemulihan Ekonomi 2. Peningkatan SDM 3. Peningkatan pelayanan publik	1. Penanganan dampak Covid 19 2. Pemberdayaan UMKM 3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kapasitas aparatur nagari 5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari
2023	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan sumber daya yang unggul, pengembangan potensi wisata dan pangan serta peningkatan pelayanan public	1. Peningkatan sumberdaya manusia 2. Pemulihan ekonomi disektor pariwisata, pangan dan infrastruktur 3. Peningkatan Pelayanan Publik	1. Pemulihan Ekonomi sektor pangan, pariwisata dan sektor unggulan 2. Peningkatan SDM 3. Peningkatan pelayanan public	1. Penanganan dampak Covid 19 2. Pemberdayaan UMKM 3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kapasitas aparatur nagari 5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan penyelenggaraan

				pemerintahan nagari 6. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan
2024	Peningkatan daya saing daerah dan produktivitas sektor unggulan	1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia 2. Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah 3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Peningkatan SDM 2. Peningkatan ekonomi sektor unggulan	1. Pemberdayaan UMKM 2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia 3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan
2025	Pemantapan industry pangan local yang berdaya saing nasional dengan didukung oleh teknologi tepat guna	1. Peningkatan SDM pengolahan, ekonomi masyarakat, pengembangan riset dan teknologi tepat guna 2. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Peningkatan dan pengembangan produk unggulan yang didukung dengan teknologi	1. Peningkatan UMKM yang berdaya saing 2. Pengembangan teknologi dalam mendukung UMKM 3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan
2026	Kemandirian daerah didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat	1. Kemandirian Ekonomi 2. Sosial Budaya 3. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Kemandirin Nagari yang maju dan berprestasi	1. Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berprestasi 2. Pengembangan dan perluasan UMKM terhadap akses pasar

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah Nagari dalam setiap tahunnya. Program – program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga – lembaga pemerintahan Nagari. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintahan desa, Bamus, dan lembaga – lembaga masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kebijakan peraturan yang berlaku.

Berikut ini merupakan beberapa program pembangunan yang menjadi agenda pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie setiap Tahunnya:

1. PROGRAM PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA / PRASARANA LINGKUNGAN

Program ini merupakan program pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang menyangkut lingkungan sekitar desa seperti Jalan desa, saluran irigasi, drainase dan sarana prasarana lingkungan lainnya. Adapun prioritas pembangunan ini biasanya disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA / PRASANA FISIK PERKANTORAN, KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN SOSIAL

Program ini difokuskan pada pembangunan serta Pemeliharaan sarana/prasarana non-fisik pada bidang perkantoran, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana agar dapat membantu kelancaran serta meningkat Kualitas Kinerja. Adapun prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan.

3. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANG SARANA / PRASANAN NON-FISIK PERKANTORAN, KESEHATAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL

Program ini merupakan kegiatan pembangunan sarana / prasarana non-fisik pada bidang perkantoran, kesehatan, pendidikan, dan Sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan sarana Prasana agar dapat membantu kelancaran serta meningkatkan kualitas kineja. Adapun prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan.

4. PENGADAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA EKONOMI

Program ini merupakan program mencakup tentang pembangunan, pengadaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana di bidang ekonomi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana perekonomian, baik untuk masyarakat maupun pemerintahan desa. Prioritas Pembangunan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan program pengembangan yang akan dilakukan.

5. KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KESENIAN DAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

Program ini merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk membangun, memelihara, serta pengadaan sarana / prasarana di bidang.

Tabel 8.1 Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari

BAB IX PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Nagari saling bekerjasama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RPJM Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian Nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Nagari, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa diselenggarakan secara proporsional.

86